

**PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2001-2016
(SUMBANGAN MATERI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH
DI SMA NEGERI 1 LUBUKLINGGAU)**

Farida, Yunani Hasan

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

Diki Jayan Dika

Alumni Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Perkembangan Sosial Ekonomi Kota Lubuklinggau Tahun 2001-2016 (Sumbangan Materi Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Lubuklinggau)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan sosial Kota Lubuklinggau tahun 2001-2016 dan bagaimana perkembangan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2001-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sosial Kota Lubuklinggau tahun 2001-2016 dan untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2001-2016. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kota Lubuklinggau menjadi kota madya pada tahun 2001 setelah sebelumnya menjadi kota administratif dari Kabupaten Musi Rawas. Pada bidang sosial yang diteliti penulis mencakup pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, kemiskinan, keamanan, dan ekonomi. Peningkatan terjadi yakni pada bidang pendidikan, agama, kesehatan dan keamanan dan penurunan terjadi pada bidang kemiskina. Sedangkan pada bidang ekonomi, terjadi peningkatan baik pendapatan daerah regional bruto (PDRB) maupun pendapatan perkapita Kota Lubuklinggau.

Kata kunci : *Kota Lubuklinggau, Sosial, Ekonomi*

Abstract: This study entitled "The Development of the Socio-Economic Development of the City of Lubuklinggau in 2001-2016 (Contribution of Material in Historical Subjects in Lubuklinggau 1 Public High School)". The problems in this study are how the social development of Lubuklinggau City in 2001-2016 and how the economic development of Lubuklinggau City in 2001-2016. The purpose of this study was to determine the social development of Lubuklinggau City in 2001-2016 and to find out the economic development of Lubuklinggau City in 2001-2016. This study uses historical methods with steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. From the results of the study it was found that Lubuklinggau City became a municipality in 2001 after previously being the administrative city of Musi Rawas Regency. In the social field, the authors studied cover the fields of education, religion, health, poverty, security, and the economy. The increase occurred in the fields of education, religion, health and security and the decline occurred in the Ministry of Education. While in the economic field, there was an increase in both gross regional income (GRDP) and per capita income in Lubuklinggau City.

Keywords: Lubuklinggau City, Social, Economy

PENDAHULUAN

Berakhirnya masa Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto telah membawa Negara Indonesia memasuki suatu babak baru guna mewujudkan masyarakat yang demokratis, maju, dan mandiri. Untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan dalam gerakan Reformasi, maka perubahan-perubahan yang mendasar perlu dilakukan, termasuk

perubahan pada bidang politik, sosial, dan juga ekonomi (IIDEA, 2000:3).

Pada bidang politik melalui Reformasi tersebut telah menghasilkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berarti telah diberikannya wewenang lebih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengambil tanggung

jawab yang lebih besar dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat. Melalui otonomi diharapkan pemerintah pusat tidak terlalu aktif dalam urusan pengaturan daerah dan daerah itu sendiri menjadi lebih mandiri dalam melakukan setiap kegiatannya sesuai dengan wewenang yang diberikan (Widjaja, 2011:7). Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta tanggung jawab kepada daerah. Kemudian diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya, serta pembangunan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan potensi serta keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPAD Kota Lubuklinggau, 2005: 1).

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000 serta diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah diberikan

wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan dikeluarkannya tersebut membuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih bersifat desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah (Abdullah, 2005:1). Adanya perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas pemerintah daerah dan menghasilkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga meningkatkan pemberdayaan berkelanjutan, baik bagi pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hal ini juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Noor, 2012: 6).

Sifat dinamis yang dimiliki oleh Otonomi Daerah membuatnya tidak tetap dan bisa berubah sesuai dengan keadaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian ada kemungkinan daerah mendapatkan penambahan ataupun pengurangan pekerjaan dalam mengelola wilayahnya, serta bisa juga terjadi kemungkinan suatu daerah dihapuskan dan terjadi pembentukan daerah-daerah yang baru (Kansil, 2005: 157). Otonomi Daerah telah membuka peluang bagi daerah-daerah baik Provinsi ataupun kabupaten untuk melakukan pemekaran agar bisa fokus melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Namun hal ini harus didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor-faktor yang dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan akan mampu mengurus daerahnya itu. Salah satu daerah yang terkena dampak dari undang-undang tersebut adalah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami pemekaran pada beberapa wilayahnya.

Sebelum disahkannya peraturan mengenai Otonomi Daerah, Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki Tujuh Kabupaten/Kota. Namun setelah itu berangsur-angsur terjadi pemekaran wilayah yang diawali dengan terbentuknya Kota Prabumulih,

Kota Lubuklinggau dan Kota Pagar Alam pada tahun 2001. Kemudian terbentuknya Kabupaten Banyusin pada tahun 2002, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten OKU Timur pada tahun 2003, Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2007, hingga yang terbaru adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 (Kemendagri, 2014: 7–8). Hingga tahun 2018, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki 17 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk daerah kotamadya yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau. Dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya undang-

undang Otonomi Daerah telah mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2017: 3).

Dalam skup yang lebih sempit, penerapan Otonomi Daerah juga berimbas pada Kabupaten Musi Rawas yang telah mengalami dua kali pemekaran wilayah pasca diberlakukannya kebijakan tersebut. Wilayah yang memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas yaitu Kota Lubuklinggau yang secara resmi memisahkan diri pada tahun 2001 berdasarkan UU No. 7 tahun 2001 dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mendapatkan statusnya sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 16 Tahun 2013 (Kemendagri, 2014: 7–8). Cita-cita pendirian Kota Lubuklinggau ini awalnya didasarkan atas kabupaten Musi Rawas yang memiliki luas yaitu 18.783,60 km², disamping keinginan masyarakat dan pemerintah daerah yang amat tinggi dalam pembentukan Kota Lubuklinggau guna upaya pemerataan pembangunan. Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Lubuklinggau merupakan bagian dari

kabupaten Musi Rawas yang pada waktu itu memiliki 11 Kecamatan, yang terdiri dari Muara Beliti, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Lubuk Linggau Barat, Lubuk Linggau Timur, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Muara Rupit, Jaya Loka, Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas, dan Tugumulyo (Charras dan Pain, 1993: 57).

Keinginan warga kota Lubuklinggau untuk dapat memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas pada akhirnya dapat terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kehidupan

pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat, prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Widjaja, 2007: 8).

Setelah menjadi daerah otonom dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2001 maka wilayah Kota Lubuklinggau bukanlah lagi bagian dari Kabupaten Musi Rawas melainkan sudah menjadi bagiannya sendiri. Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau adalah Wilayah Administratif Lubuklinggau yang lama ditambah beberapa desa yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas yakni sebagian wilayah kecamatan Muara Beliti terdiri atas Desa Marga Mulya, Desa Tanah Periuk, Desa Lubuk Kupang, Desa Air Kati, Desa Rahma, Desa Jukung, Desa Siring Agung, Desa Eka Marga, Desa Karang Ketuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas terdiri dari Desa Sumber Agung, Desa Durian Rampak, dan Desa Tanjung Raya. Wilayah itu ditetapkan dan ditata ulang sehingga menjadi kecamatan yang baru (Setneg, 2001).

Pembangunan Kota Lubuklinggau berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut diterapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi berbagai faktor penghambat perkembangan Kota Lubuklinggau. Untuk itu diperlukan manajemen strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit yang lebih maju. Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu memfasilitasi pembangunan kota secara proaktif dengan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam hal ini daerah sebagai wadah pembangunan harus dikembangkan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki, dengan mengerahkan semua potensi sumber daya aparatur pemerintah, swasta maupun masyarakat mulai dari tahap pelaksanaan dan kepemilikan (KPAD Kota Lubuklinggau, 2005: 5)

Sejauh ini Penulis melihat pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Lubuklinggau diarahkan kepada sektor perdagangan dan jasa, industri

kecil dan menengah, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan. Hal ini ditunjang letak geografis Kota Lubuklinggau sebagai kota perlintasan menuju provinsi-provinsi lain di Sumatera seperti Bengkulu dan Jambi. Progresifitas pembangunan Kota Lubuklinggau tersebut dapat terlihat dengan perubahan yang terjadi dari tahun 2001-2016 setelah berdirinya Kota Lubuklinggau. Sejalan dengan pertimbangan tersebut diperlukan sebuah kajian yang mampu memberikan sumbangan bagi kehidupan sejarah di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai Kota Lubuklinggau dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perkembangan Sosial dan Ekonomi Kota Lubuklinggau Tahun 2001-2016 (Sumbangan Materi pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Lubuklinggau”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (metode historis). Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian, dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2015:27). Metode sejarah juga diartikan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah yang terdiri dari langkah-langkah seperti pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 2013: 64).

Langkah-langkah Penelitian

Heuristik

Pada tahap awal penulis berusaha mengumpulkan data-data berupa buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Langkah awal penelitian ini yaitu heuristik. Kata heuristik berasal dari kata “heuriskein” dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan. Peneliti memasuki lapangan penelitian dimulai

pada tahap pengumpulan sumber (heuristik) (Daliman,2015:51-52).

Kritik Sumber

Setelah selesai dilaksanakannya langkah pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, maka yang harus dilaksanakan berikutnya adalah mengadakan kritik (verifikasi) sumber. Kritik sumber merupakan uji validasi terhadap sumber-sumber sejarah. Uji validasi sumber dilakukan bersamaan dengan ditemukannya sumber-sumber sejarah. Terdapat dua jenis kritik sumber pada penelitian sejarah yaitu kritik eksternal dan kritik internal (Irwanto dan Sair, 2014:77).

Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga dengan analisis sejarah yang berarti menguraikan. Secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun, keduanya dianggap sebagai metode utama dalam interpretasi. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta-fakta yang

diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64).

Historiografi

Setelah dilakukan proses heuristik, kritik sumber, dan interpretasi sebagai tahap akhir penulisan ini, penulis membuat laporan hasil penelitian atau yang biasa disebut historiografi. Historiografi adalah ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah (Irwanto dan Sair, 2014:151). Historiografi juga berarti cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 1999: 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sosial Kota Lubuklinggau Tahun 2001-2016

1. Pendidikan

Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Selain

itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggaraan pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah hingga saat ini terus memperhatikan pengembangan pendidikan, salah satunya dengan cara pengadaan sarana prasarana dan guru yang secara langsung memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan (BPS Kota Lubuklinggau, 2017: 82).

Tidak hanya sebatas pengadaan sarana dan prasarana, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota

Lubuklinggau juga membuat program dan kebijakan untuk mendukung pendidikan di Indonesia khususnya daerah Kota Lubuklinggau. Salah satunya pemerintah menyelenggarakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah dimulai sejak tahun 2005. Kebijakan untuk sekolah swasta dalam aspek bantuan operasional sama dengan sekolah negeri dimana siswa didata oleh kepala sekolah untuk diberikan bantuan operasional. Dana tersebut kemudian diterapkan di sekolah sebagai pengganti iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Untuk siswa reguler pada sekolah negeri dibebaskan biaya SPP sedangkan untuk di sekolah swasta tetap membayar kecuali siswa yang sudah didata oleh sekolah untuk mendapat bantuan (wawancara dengan Bapak H. Tamri, MM pada Rabu 29 Agustus 2018).

Pada tahun 2013 pemerintah Kota Lubuklinggau melalui salah satu misinya berupaya untuk mewujudkan

masyarakat yang cerdas dengan strategi meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta revitalisasi perpustakaan. Selanjutnya arah dan penentuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna tercapainya tujuan tersebut tidak melenceng dari ketiga strategi tersebut. Tidak hanya itu saja, pemerintah daerah Kota Lubuklinggau juga membuat berbagai macam program unggulan dalam usaha membangun pendidikan. Kota Lubuklinggau di bawah kepemimpinan Walikota H. SN Prana Putra Sohe dan Wakil Walikota H. Sulaiman Kohar telah mencanangkan 7 program Pemerintah yang salah satu diantaranya adalah pembangunan bidang pendidikan. Cakupan usaha pembangunan pada bidang pendidikan antara lain adalah (<http://www.bappeda.lubuklinggau.go.id>) :

- 1) Kartu linggau Bisa Pintar (KLBP)
- 2) Beasiswa untuk guru dan siswa

- 3) Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan Pemberian atribut sekolah secara gratis
- 4) Pengadaan bus sekolah yang bertujuan melayani jalur Sekolah-Sekolah agar siswa tidak mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah
- 5) Di bidang kepramukaan pemerintah memberikan seragam pramuka gratis.

2. Agama

Pembangunan bidang keagamaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini termasuk kedalam program pemerintah pada tujuan kedua dalam misi kelima yaitu terciptanya keharmonisan antar suku, ras dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dijabarkan dengan satu sasaran yaitu terbinanya ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, indikator kinerja utama pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan cara membina lembaga agama yang ada di

Kota Lubuklinggau. Ada Lima agama yang dianut di Kota Lubuklinggau, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Pemeluk lima agama ini hidup dengan rukun dan saling menghargai. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya deklarasi kerukunan umat beragama di Kota Lubuklinggau pada tahun 2016, yang dihadiri oleh seluruh perwakilan setiap agama. Dari data yang ada, tampak bahwa kehidupan beragama terus diupayakan untuk ditingkatkan antara lain melalui pembangunan tempat ibadah.

3. Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang cukup diprioritaskan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau selain bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada masa kepemimpinan H. Riduan Effendi tahun 2008 yang mencetuskan berbagai programnya guna meningkatnya derajat kesehatan di Kota Lubuklinggau. Program-program tersebut diantaranya adalah Program obat dan perbekalan kesehatan,

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program upaya kesehatan masyarakat, Program pengawasan obat dan makanan, Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya, serta Program kemitraan pelayanan kesehatan (Bappeda, 2013: 28).

Beralih ke masa pemerintahan berikutnya, kebijakan-kebijakan pada masa sebelum 2013 tetap dijalankan oleh pemerintahan yang baru, namun dilakukan sedikit inovasi agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar, sedang dalam kondisi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam

segala sisi. Salah satu program pembangunan pemerintah ini adalah pembangunan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari program ini selain kesejahteraan adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga terciptalah Lubuklinggau yang sehat, baik sehat secara jasmani maupun rohani. Turunan dari program bidang kesehatan ini yaitu :

- 1). Kartu Linggau Bisa untuk Sehat, Program kesehatan jempit bola (*Health On Call Centre* dan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap (<http://www.bappeda.lubuklinggau.go.id>).

4. Kemiskinan

kemiskinan di Kota Lubuklinggau semakin berkurang. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase penduduk miskin setiap tahun semakin menurun. Pada tahun 2004, presentase penduduk miskin mencapai 16,42%. Persentase kemiskinan terus ditekan sehingga pada tahun 2016 presentase kemiskinan mencapai angka 13,99%.

Penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan dengan kebijakan klaster yang berisi penanggulangan kemiskinan yaitu dengan carabantuan dan perlindungan sosial, program pro rakyat yang mana diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan meningkat secara sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro dengan harapan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin. Adapun kebijakan umum yang dilaksanakan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, diantaranya yaitu perluasan akses pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin; peningkatan upaya perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial; Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat; perluasan akses pendidikan gratis untuk masyarakat miskin; pemberian beras miskin untuk masyarakat miskin; peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM;

sinergitas dan peningkatan kualitas program pemberdayaan masyarakat; peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN dalam fasilitasi kredit usaha terhadap pelaku usaha ekonomi kecil menengah, dan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang menyentuh masyarakat.

5. Keamanan

Pada penelitian ini, bidang kriminalitas yang terjadi di Kota Lubuklinggau antara lain: subversi, korupsi, penyelundupan, pelanggaran wilayah perairan, penipuan, kesusilaan, pelanggaran, ketertiban umum, pencurian/perampokan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan penadahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yakni motivasi intrinsik (intern) dan motivasi ekstrinsik (ektern). Motivasi intrinsik (intern) meliputi faktor ekonomi, faktor *intelligence*, faktor usia, dan faktor jenis kelamin, sedangkan faktor

ekstrinsik meliputi faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. Dari tahun 2003 sampai dengan 2016, rata-rata kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah pencurian/perampokan. Jika dilihat pada tabel di 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa keamanan di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tabel total jumlah kejahatan pada tahun 2002 hanya sedikit yakni 29 kejahatan sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 64 kali.

Perkembangan Ekonomi Kota Lubuklinggau Tahun 2001-2016

1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kota Lubuklinggau selama kurun waktu 2001 hingga 2016 menurut harga berlaku, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 yang merupakan tahun pemekaran menyentuh angka 725.692.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan ke

angka 1.158.123.000 rupiah, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan hingga angka 2.124.494.000 rupiah dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kembali hingga angka 5.122.233.000. Perekonomian di Kota Lubuklinggau cenderung didominasi oleh sektor tersier, salah satunya sektor perdagangan yang mana merupakan sektor yang mengalami perkembangan dan menyumbang pendapatan paling besar pada perekonomian Kota Lubuklinggau. Hal tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau dengan memanfaatkan letak geografis kota di persimpangan jalur kegiatan ekonomi. Kota Lubuklinggau yang terletak di persimpangan jalur perdagangan daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin di bidang perdagangan.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional perkapita ini menunjukkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk dari tahun ke

tahun. Pendapatan perkapita di Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan pemerintah Kota Lubuklinggau memanfaatkan segala potensi yang ada di Kota Lubuklinggau baik di sektor primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, letak geografis Kota Lubuklinggau juga memberi keuntungan untuk perekonomian terutama di bidang perdagangan yang merupakan penyumbang utama pendapatan daerah Kota Lubuklinggau. Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat perkembangan pendapatan yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, jika dibandingkan pada awal pemekaran yaitu tahun 2001 pendapatan perkapita untuk harga berlaku sebesar 4.443.367 rupiah. Pada tahun 2005 mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 6.592.293 rupiah. Setelah Sepuluh tahun pemekaran lonjakan kenaikan terlihat sangat signifikan hingga mencapai angka 10.575.715 menurut harga berlaku sedangkan pendapatan perkapita menurut harga berlaku konstan sebesar 5.570.939. Pendapatan perkapita yang dihitung

berdasarkan harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan relatif kecil dan cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 yang mana menjadi 12.339.231 rupiah berkembang Dua kali dari tahun sebelumnya yang mana hanya sebesar 6.330.111 rupiah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau. 2017. *Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2017*.
- Daliman. 2015. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan. 2017. *Sumatera Selatan dalam Angka 2017*. Palembang : Pemerintah Sumatera Selatan
- Charras, Muriel dan Marc Pain. 1993. *Spontaneous Settlements in Indonesia*.
- Hamid, ABD Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Internasional IDEA. 2000. *Penilaian Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Ameenpro Graphic Design and Printing
- Irwanto, Dedi dan Alian Sair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher
- Kartodirjo, Sartono. 2016. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Kansil, Christine S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kemendagri. 2014. *Pembentukan Daerah-Daerah Otom sampai dengan Tahun 2014*. Jakarta : Kemendagri
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Noor, Isran. 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Seven Strategic Studies
- Pemerintah Kota Lubuklinggau. 2005. *Profil Daerah Kota*

Lubuklinggau. Lubuklinggau :
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Lubuklinggau

Setneg. 2001. *Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota
Lubuklinggau. Sekretaris
Negara RI*

Widjaja. 2007. *Otonomi Daerah dan
Daerah Otonom. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.*

_____.2011. *Otonomi Daerah dan
Daerah Otonom. Jakarta : Rajawali
Pers*

Sumber Internet

*[http://www.bappeda.lubuklinggau.go.i](http://www.bappeda.lubuklinggau.go.id)
d. Diakses pada Jum'at 10
Agustus 2010 Pukul 12.00 WIB*